

PROSPEK PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI AMBARAWA: STUDI PENJAJAGAN KEBUTUHAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Puthut Indroyono

Yayasan Agroekonomika

Krisdiono, Renan Subantoro, Yosef Krido Priyono

Bina Swadaya

ABSTRACT

This research is a “snapshot” of the people’s economic problems especially of the socio-economic and cultural institutions in the villages in Kecamatan Ambarawa. The research has identified institutions and the so-called micro-finance institutions in the villages as initiated by both the people in the villages and by the village government. The government policies to mobilize the micro-finance institutions through top-down planning were carried out by various government institutions with limited success. It is now realized that it will be more effective and successful if it is implemented by the village people themselves in the form of self-reliance movement on micro finance.

Keywords: *micro-finance institution, ekonomi rakyat, participative development*

“... Secara umum bisa dikatakan bahwa program-program pemerataan sudah relatif berhasil di Jawa berkat berbagai prasarana jalan, tenaga listrik, dan lain-lain, sehingga tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk juga meningkat pesat sampai ke desa-desa. Namun demikian ada kecenderungan kuat bahwa apabila ekonomi tumbuh amat cepat, maka pertumbuhan ekonomi di kota dan sektor modern jauh lebih cepat ketimbang ekonomi desa dan pertanian, sehingga kesenjangan kota-desa justru meningkat.” (Mubyarto, 2001).

PENDAHULUAN

Selain terdapat telaga yang cukup luas (2000 ha) bernama Rawa Pening beserta kisah legendanya yang terkenal, nama Ambarawa

juga dikenal sebagai kota kecil yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Prestasi yang terkenal dari kegigihan pejuang-pejuang Ambarawa adalah ketika menghancurkan markas penjajah Belanda (Benteng Willem I) yang hanya membutuhkan tempo 2 jam.¹ Letaknya yang tidak jauh dari kota Semarang, ibukota propinsi Jawa Tengah, ditambah topografi wilayahnya yang berbukit-bukit menyebabkan daerah ini memiliki arti sangat strategis bagi perjuangan kemerdekaan pada waktu itu.

Kalau pada saat perjuangan kemerdekaan, Ambarawa menduduki peran terdepan dalam perjuangan, bagaimanakah posisi Ambarawa saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Sudahkah masyarakat Ambarawa dan sekitarnya menuai makna kemerdekaan yang ditun-

jukkan dalam peningkatan taraf hidup yang lebih baik, kesejahteraan lahir dan batin?

Ambarawa memiliki luas wilayah 56,12 km² dengan penduduk tahun 2000 sebesar 82.794 jiwa. Kepadatan penduduk Ambarawa adalah 1475 jiwa/km², dan bersama dengan kecamatan Ungaran, Bergas, dan Tenganan, merupakan kecamatan-kecamatan terpadat di wilayah kabupaten Semarang, yaitu masing-masing 1556, 1069, dan 1189 jiwa/km². Batas-batas wilayahnya adalah di sebelah utara kecamatan Sumowono, sebelah selatan kecamatan Banyubiru, kecamatan Jambu di sebelah selatan, dan kecamatan Bawen di sebelah timur.

Secara administrasi pemerintahan, Ambarawa merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan kecamatan-kecamatan lain adalah: Getasan, Tenganan, Susukan, Suruh, Pabelan, Tuntang, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Bawen, Bringin, Pringapus, Bergas, dan Ungaran.² Dilaporkan bahwa kecamatan Susukan, Suruh, Sumowono, dan Bringin merupakan kecamatan-kecamatan yang "tertinggal", terbukti dari diprioritaskannya wilayah itu untuk program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang akan berjalan pada tahun 2002 ini. Tahun-tahun sebelumnya kabupaten Semarang tidak menjadi prioritas bagi program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) di propinsi Jawa Tengah.

Kesejahteraan penduduk Ambarawa maupun penduduk kabupaten Semarang tergolong tinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal itu dapat dilihat dari indikator IPM (Indek Pembangunan Manusia) yang diterbitkan oleh UNSFIR-UNDP (tabel terlampir). Terdapat tiga kategori di dalam

IPM, yakni: Indek Harapan Hidup (IHH), Indek Pendidikan (IP), dan Indek Daya Beli (IDB). Di propinsi Jawa Tengah, kabupaten Semarang menduduki peringkat 5 besar pada tahun 1999, sama peringkatnya dengan tahun 1996. Angka Harapan Hidup naik dari peringkat 7 pada tahun 1996, menjadi peringkat 6 pada tahun 1999. Indek Pendidikan turun dari peringkat 7 menjadi peringkat 8 pada tahun-tahun yang sama. Yang cukup menarik adalah menurunnya indek daya beli dari peringkat 7 pada tahun 1996 turun drastis menjadi peringkat 16 pada tahun 1999. Kuat diduga bahwa penurunan daya beli masyarakat kabupaten Semarang terjadi akibat krisis moneter (krismon) yang mengalami puncaknya pada tahun 1998. Lebih spesifik lagi, penurunan daya beli masyarakat tersebut banyak dialami dan dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pusat-pusat industri modern yang banyak terdapat di kabupaten Semarang, utamanya Ungaran dan sekitarnya. Sedangkan daerah-daerah lain seperti Ambarawa, Banyubiru, dan Jambu, beserta daerah di sekitarnya, yang sektor pertaniannya masih sangat dominan, dampak krismon tidak berpengaruh besar pada daya beli masyarakat.

Pendapatan perkapita penduduk Ambarawa atas dasar harga konstan (1993) tahun 2000 adalah sebesar Rp 1.025.256, atau hampir mendekati kondisi sebelum krisis pada tahun 1996 (Rp 1.106.904). Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari angka untuk kecamatan-kecamatan Bergas, Pringapus, dan Ungaran yang mencapai masing-masing Rp 3,9 juta, Rp 2,4 juta, dan Rp 3,0 juta, sekaligus angka untuk kabupaten Semarang sebesar Rp 1,25 juta. Perbedaan yang cukup menyolok ini menunjukkan adanya ketimpangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin di kabupaten Semarang.

Penduduk Ambarawa tersebar di 16 desa/kelurahan dengan rata-rata jumlah penduduk perdesa sebesar 5.174 jiwa. Desa/kelurahan terpadat adalah Kupang, Panjang, Lodoyong, dan Bandungan, masing-masing berpenduduk

¹ Penuturan Bapak Hardono, penduduk desa Ngampin, salah seorang saksi dan pelaku sejarah "Peristiwa Ambarawa".

² Pada saat ini dua kecamatan baru terbentuk hasil pemekaran wilayah, yaitu: kecamatan Kaliwungu, dan Bancak, masing-masing merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Tenganan dan kecamatan Bringin.

12.396 jiwa, 8.642 jiwa, 6.443 jiwa, dan 6.170 jiwa. Sedangkan desa/kelurahan terjarang penduduknya adalah Bejalen, Pojoksari, Kranggan, dan Jetis, yang masing-masing berpenduduk hanya 1.380 jiwa, 2.562 jiwa, 2.648 jiwa, dan 3.275 jiwa.

Apabila Ambarawa dibagi atas wilayah-wilayah yang berada di perbukitan tinggi, wilayah tengah di sekitar pusat kota Ambarawa, dan wilayah bawah di sekitar Rawa Pening, maka desa-desa yang terdapat di wilayah itu adalah: Ambarawa Atas terdiri dari 8 desa, yaitu: Pasekan, Baran, Mlilir, Duren, Jetis, Bandungan, Kenteng, dan Candi; Ambarawa Tengah terdiri dari 5 desa, yaitu: Kupang, Lodoyong, Panjang, Kranggan, dan Ngampin; dan Ambarawa Bawah terdiri dari 3 desa, yaitu: Pojok Sari, Bejalen, dan Tambak Boyo.

Walaupun di kecamatan-kecamatan sekitarnya masih agraris, ekonomi rakyat Ambarawa tidak lagi tergolong agraris. Sektor-sektor jasa, pertanian, perdagangan, dan industri adalah sektor-sektor yang menonjol di daerah itu. Untuk memasarkan hasil bumi masyarakat Ambarawa dan sekitarnya memiliki 4 buah pasar yang cukup sibuk. Pasar Projo adalah pasar terbesar yang terletak di jalan raya propinsi yang menghubungkan kota Semarang dan Magelang. Selain sudah memiliki pasar di Bandungan dan Kenteng, saat ini Pemda Semarang dan Pemerintah Desa Jetis juga sudah menandatangani kontrak untuk pembuatan pasar bunga dan pasar buah di desa itu. Seperti diketahui, pemasaran bunga dari daerah ini cukup luas tidak saja ke kota Semarang, tetapi juga untuk memenuhi pasokan bunga untuk kota-kota besar lainnya.

Meskipun proses pengumpulan datanya masih banyak dipersoalkan, namun data keluarga Prasejahtera yang dikeluarkan oleh kantor BKKBN dapat dipakai untuk mengetahui kecamatan-kecamatan di kabupaten Semarang yang tergolong miskin. Banyubiru, Ungaran, Ambarawa, dan Bawen adalah kecamatan yang tergolong sejahtera

dibanding kecamatan lain, dengan persentase keluarga Prasejahtera "*alek*" (alasan ekonomi) sebesar masing-masing 5,8%, 12,8%, 17,1%, dan 17,3%. Kecamatan-kecamatan lain persentasenya lebih dari 25%, bahkan ada yang melebihi 40%. Namun karena jumlah penduduk di Ambarawa dan Ungaran juga cukup besar maka jumlah keluarga miskin secara absolut di dua kecamatan itu juga besar, yakni masing-masing 3.572 keluarga dan 3.404 keluarga.

Berbagai program pananggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-programnya selama ini. Program penanggulangan kemiskinan seperti program IDT, Takesra/Kukesra, program JPS, dan lain-lain, juga pernah dilaksanakan di Ambarawa dan wilayah sekitarnya. Program-program itu dilaksanakan melalui pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, diberikan pendampingan, serta bantuan modal.

Mengingat relatif besarnya jumlah penduduk miskin di Ambarawa, kebutuhan akan program penanggulangan kemiskinan di daerah ini masih perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Selain merupakan upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang belum sempat menikmati kemerdekaan dalam bentuk penghidupan yang layak, program pananggulangan kemiskinan di daerah ini juga sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin.

Berikut ini adalah hasil Studi Penjajagan Kebutuhan Pendampingan yang dilakukan bersama-sama dengan Tim Bina Swadaya. Laporan ini berupa "*snapshot*" permasalahan ekonomi rakyat Ambarawa, khususnya untuk menemukannya lembaga-lembaga sosial-ekonomi yang ada di desa/kelurahan di Ambarawa dan sekitarnya. Penulis yang selama satu setengah bulan menetap di kelurahan Ngampin, Ambarawa, bersama dengan tim Bina Swadaya telah mengadakan kunjungan singkat ke desa/kelurahan selama 3 hari (17, 18, dan 20 Mei 2000), yaitu: Bejalen,

Lodoyong, Kebon Dalem (desa IDT), Kuarasan, Kenteng, dan Jetis. Pada hari terakhir, dilakukan kunjungan ke kecamatan Ambarawa untuk melakukan diskusi singkat dengan Camat Ambarawa dan petugas PLKB.

Pemaparan ini dimulai dengan kondisi dan permasalahan perekonomian Ambarawa secara umum, masalah otonomi daerah, masalah Rawapening, dengan bahan dari berbagai sumber penerbitan seperti Kantor Statistik kab. Semarang, Bappeda, dan media massa, serta berbagai hasil wawancara. Pada bagian akhir dipaparkan hasil kunjungan tim ke desa/kelurahan kasus.

STRUKTUR EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Sejak lama masyarakat Ambarawa tidak lagi mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian. Pertanian hanya menduduki sektor kedua setelah Jasa dalam perekonomian Ambarawa yakni masing-masing sebesar 25,3% dan 19,5%. Sektor ketiga dan keempat yang cukup banyak menyumbang adalah sektor Industri Pengolahan (17%) dan perdagangan, hotel, dan restoran (17,8%). Sektor-sektor lain seperti Bangunan, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Perbankan, Listrik, Gas, dan Air Bersih, dan Pertambangan hanya menyumbang sebesar masing-masing 6,5%, 5,7%, 5,5%, 2,2%, dan 0,5%.

Di antara kecamatan-kecamatan se Eks. Kawedanan Ambarawa yakni Banyubiru, Jambu, Sumowono, Ambarawa, dan Bawen, hanya kecamatan Banyubiru dan Sumowono yang sektor pertaniannya masih mendominasi PDRB. Sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB di kedua kecamatan itu masing-masing 37,3% dan 50,3%, sedangkan Bawen dan Jambu masing-masing menyumbang 18% dan 26,3%. Dari seluruh sektor pertanian di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut, sektor tanaman pangan adalah sektor yang paling dominan.

Sektor pertanian di kabupaten Semarang juga merupakan sektor yang masih menyerap tenaga kerja paling besar dari seluruh tenaga kerja yang ada. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani di kabupaten Semarang adalah sebesar masing-masing 33% dan 19,4%. Di kecamatan Ambarawa, petani dan buruh tani tetap masih yang terbesar di antara lapangan kerja di wilayah itu, yakni sebesar 26,5%, dan 19,7%. Tiga kecamatan yaitu Pringapus, Bergas, dan Ungaran, adalah kecamatan-kecamatan yang penduduknya paling sedikit bermatapencaharian petani dan buruh tani. Buruh industri, buruh bangunan, dan dagang, adalah mata pencaharian yang banyak dilakukan penduduk di tiga kecamatan terakhir ini. Yang istimewa dari Ambarawa adalah mata pencaharian sebagai pedagang, yang menempati persentase terbesar di antara kecamatan-kecamatan di kabupaten Semarang yakni sebesar 15,4%. Di kecamatan lain kecuali Ungaran (14,6%), profesi pedagang jumlahnya relatif kecil tak lebih dari 5%.

Walaupun krisis moneter yang puncaknya terjadi pada tahun 1998 cukup memukul laju PDRB Ambarawa dengan kontraksi sebesar 15,6%, namun setahun berikutnya ekonomi Ambarawa sudah tumbuh lagi sebesar 5%. Pada saat krisis hampir semua sektor mengalami kontraksi kecuali subsektor perkebunan, kehutanan, Listrik, Gas dan Air Bersih, serta sektor Jasa, yakni masing-masing masih tumbuh positif sebesar 8%, 16,4%, 0,9%, dan 0,7%. Sedangkan untuk kabupaten Semarang, pada tahun yang sama juga mengalami kontraksi yang cukup besar yakni -17,8%. Di antara kecamatan-kecamatan di kabupaten Semarang yang mengalami kontraksi tertinggi adalah kecamatan-kecamatan Ungaran, Bergas, dan Pringapus, dengan kontraksi masing-masing sebesar -20,6%, -22,2%, dan -21,3%. Tiga kecamatan ini merupakan lokasi beroperasinya pabrik-pabrik bagi industri besar di kabupaten Semarang.

Tabel 1: PDRB Ambarawa Tahun 1996 – 2000 (dalam jutaan rupiah) (Harga Konstan 1993)

Sektor	1996	D	1997	G	D	1998	G	D	1999	G	D	2000	G	D	Rata-rata G	Rata-rata D
PERTANIAN	17.776,2	20,2	17.894,4	0,7	19,7	15.940,9	(10,9)	20,8	14.745,6	(7,5)	18,3	15.858,0	7,5	18,7	(2,6)	19,5
1. T. Pangan	11.490,2	13,0	11.566,0	0,7	12,7	10.811,1	(6,5)	14,1	9.806,0	(9,3)	12,2	10.523,4	7,3	12,4	(2,0)	12,9
2.T. Perkebunan	672,6	0,8	563,5	(16,2)	0,6	608,7	8,0	0,8	732,0	20,3	0,9	872,0	19,1	1,0	7,8	0,8
3. Peternakan	2.654,1	3,0	2.697,6	1,6	3,0	1.459,9	(45,9)	1,9	1.965,0	34,6	2,4	2.125,0	8,1	2,5	(0,4)	2,6
4. Kehutanan	130,9	0,1	176,1	34,5	0,2	205,0	16,4	0,3	220,5	7,6	0,3	225,0	2,0	0,3	15,1	0,2
5. Perikanan	2.828,4	3,2	2.891,2	2,2	3,2	2.856,2	(1,2)	3,7	2.022,1	(29,2)	2,5	2.111,0	4,4	2,5	(5,9)	3,0
PERTAMB.	514,2	0,6	539,4	4,9	0,6	349,0	(35,3)	0,5	351,1	0,6	0,4	323,0	(8,0)	0,4	(9,4)	0,5
INDUSTRI	14.053,3	15,9	14.239,6	1,3	15,7	13.048,0	(8,4)	17,0	14.785,3	13,3	18,4	15.090,0	2,1	17,8	2,1	17,0
L, G & A	1.700,6	1,9	1.729,4	1,7	1,9	1.745,7	0,9	2,3	1.781,8	2,1	2,2	1.950,4	9,5	2,3	3,5	2,1
BANGUNAN	10.045,0	11,4	10.468,8	4,2	11,5	2.681,0	(74,4)	3,5	2.729,1	1,8	3,4	2.450,0	(10,2)	2,9	(19,7)	6,5
PERD.,H, & R	15.633,3	17,7	16.320,5	4,4	18,0	13.878,0	(15,0)	18,1	14.366,8	3,5	17,9	14.810,0	3,1	17,4	(1,0)	17,8
PENGANGK.	4.263,0	4,8	4.818,1	13,0	5,3	4.643,1	(3,6)	6,1	4.883,4	5,2	6,1	5.339,8	9,3	6,3	6,0	5,7
BANK & L K	4.829,8	5,5	4.935,1	2,2	5,4	4.377,1	(11,3)	5,7	4.467,4	2,1	5,6	4.662,0	4,4	5,5	(0,7)	5,5
JASA-JASA	19.400,2	22,0	19.848,0	2,3	21,9	19.995,7	0,7	26,1	22.354,4	11,8	27,8	24.409,2	9,2	28,8	6,0	25,3
PDRB	88.215,8	100,0	90.793,4	2,9	100,0	76.659,3	(15,6)	100,0	80.465,2	5,0	100,0	84.885,1	5,5	100,0	(0,5)	100,0

Ket: G = Pertumbuhan, D = Proporsi, Sumber : PDRB, BPS Kab. Semarang

Tabel 2 : Mata Pencaharian Penduduk di 5 kecamatan Eks Kawedanan Ambarawa, Tahun 2000 (jiwa & persen)

Kecamatan	Petani	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan	Dagang	Angkutan	PNS	Pen-siunan	Lain-nya	Jumlah
1. Banyubiru	8.741 (34,0)	8.200 (31,9)	612 (2,4)	585 (2,3)	1.666 (6,5)	991 (3,9)	1.469 (5,7)	618 (2,4)	1.248 (4,9)	461 (1,8)	1.112 (4,3)	25.703 (100,0)
2. Jambu	12.997 (48,2)	8.139 (30,2)	-	474 (1,8)	2.100 (7,8)	1.174 (4,4)	438 (1,6)	600 (2,2)	558 (2,1)	233 (0,9)	269 (1,0)	26.982 (100,0)
3. Sumowono	6.793 (30,9)	3.114 (14,2)	-	471 (2,1)	392 (1,8)	553 (2,5)	1.343 (6,1)	176 (0,8)	354 (1,6)	221 (1,0)	8.569 (39,0)	21.986 (100,0)
4. Ambarawa	12.432 (26,5)	8.368 (17,9)	150 (0,3)	1.082 (2,3)	300 (0,6)	4.226 (9,0)	7.223 (15,4)	2.167 (4,6)	4.407 (9,4)	1.085 (2,3)	5.399 (11,5)	46.839 (100,0)
5. Bawen	11.885 (37,7)	4.201 (13,3)	175 (0,6)	681 (2,2)	7.358 (23,4)	2.673 (8,5)	999 (3,2)	235 (0,7)	890 (2,8)	287 (0,9)	2.111 (6,7)	31.495 (100,0)

Sumber: BPS Kab. Semarang

SEKTOR PERBANKAN DAN EKONOMI RAKYAT

Peran perbankan dalam suatu wilayah sangat membantu dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, tempat menyimpan uang, dan

tempat mencari kredit bagi masyarakat, perbankan yang sehat akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, perbankan yang tidak sehat akan menghambat pertumbuhan, tidak mampu mensejahterakan

masyarakat, dan dapat menggerogoti perekonomian rakyat. Perbankan yang sehat adalah lembaga yang mampu menampung simpanan masyarakat dan sekaligus menyalurkannya sebagai kredit kepada masyarakat. Pengalaman ini terlaksana pada saat Indonesia belum dilanda krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis multidimensi pada tahun 1998. Sampai saat ini pun, sektor perbankan nasional masih

belum pulih sebagai perbankan yang sehat. Salah satu indikasi masih “sakit”-nya perbankan adalah ketidakseimbangan dalam penghimpunan dana dari masyarakat dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Gejala seperti ini hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, dan tidak terkecuali di Ambarawa dan sekitarnya.

Tabel 3: Sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di 5 Kec. Eks Kawedanan. Ambarawa (Jutaan Rp)(Harga Konstan 1993)

Kecamatan	1996	1997		1998		1999		2000	
	Jumlah	Jumlah	Naik / Turun	Jumlah	Naik / Turun	Jumlah	Naik / Turun	Jumlah	Naik /Turun
Ambarawa	4.829,8	4.935,1	2,2	4.377,1	(11,3)	4.467,4	2,1	4.662,0	4,4
Sumowono	1.081,0	1.085,4	0,4	956,5	(11,9)	968,8	1,3	1.003,7	3,6
Bawen	2.409,9	2.437,8	1,2	2.144,5	(12,0)	2.170,9	1,2	2.247,6	3,5
Banyubiru	1.913,0	1.922,7	0,5	1.692,1	(12,0)	1.713,9	1,3	1.775,6	3,6
Jambu	2.003,7	2.009,3	0,3	1.769,9	(11,9)	1.793,4	1,3	1.858,7	3,6

Sumber: BPS Kab. Semarang

Upaya untuk menjembatani ekonomi rakyat dengan lembaga keuangan (sektor perbankan) sebenarnya telah banyak dibicarakan, dirumuskan, dan dilaksanakan dalam berbagai program pemerintah. Banyak program pemberdayaan ekonomi rakyat telah dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) maupun kelompok usaha bersama, dengan pendampingan, dan bantuan modal. Program IDT, Takesra/kukesra, PHBK, KCK, dan lain-lain adalah contoh dari program khusus tersebut. Tujuan jangka panjang setelah diterapkannya program-program tersebut adalah mengupayakan terbentuknya Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP). Lembaga ini diharapkan dapat menjadi “jembatan” yang menghubungkan lembaga informal (kelompok-kelompok masyarakat) dan lembaga formal (koperasi dan perbankan).

Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di Ambarawa adalah program Takesra/Kukesra (Tabungan Kesejahteraan Keluarga/Kredit Usaha Kesejah-

tereraan Keluarga), yang merupakan pengembangan UPPKS (Unit Peningkatan Pendakatan Keluarga Sejahtera) yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan dan BKKBN. Pengelolaan program ini dilaksanakan oleh para petugas PLKB yang berkantor di kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga adalah dengan memberikan bantuan dana pinjaman melalui kelompok. Program ini telah berjalan selama lima kali putaran. Pada putaran pertama, dana yang dipinjamkan hanya sebesar Rp 20.000, kemudian meningkat dua kali lipat menjadi Rp 40.000, dan seterusnya sampai putaran kelima dengan dana yang dipinjamkan sebesar Rp 320.000. Sampai dengan putaran kelima, telah tersalur dana sebesar Rp 782,69 juta. Bunga pinjaman dibebankan sebesar antara 0,5% – 1% per-bulan. Menurut petugas PLKB kecamatan, jumlah “kredit macet” atau tunggakan pinjaman sampai dengan bulan Mei

2002 sangat kecil, yakni hanya sebesar 2,25% atau sekitar Rp 7 juta.

Kini, setelah dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dilunasi dan program tersebut telah dirasakan manfaatnya, pengembalian dana oleh masyarakat tidak digulirkan lagi

kepada masyarakat. Keterbatasan dana pemerintah akibat krisis moneter yang masih berlangsung sampai saat ini merupakan alasan yang sering dilontarkan oleh para petugas di kecamatan.

Tabel 4: Lima Putaran Kukesra di Kecamatan Ambarawa

Putaran	Dana pinjaman per KK	Jml Peminjam (jiwa)	Jumlah Angsuran	Jml Kelompok	Total Dana
I	Rp 20.000	2.806	4 kali	129	Rp 56.120.000
II	Rp 40.000	2.184	6 kali	100	Rp 87.360.000
III	Rp 80.000	1.620	8 kali	77	Rp 129.610.000
IV	Rp 160.000	1.247	10 kali	64	Rp 199.520.000
V	Rp 320.000	969	12 kali	55	Rp 310.080.000
					Rp 782.690.000

Sumber: Laporan Petugas PLKB Kec. Ambarawa

Kecilnya bunga yang dibebankan kepada anggota kelompok usaha bersama menjadi salah satu tantangan bagi pengembangan kelompok swadaya masyarakat. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah kebiasaan “bunga kecil” menjadi pola bunga yang lebih realistis sesuai bunga pasar. Secara prinsip, keterbatasan ekonomi rakyat dalam mengakses kredit perbankan bukan disebabkan oleh tingginya suku bunga, tetapi lebih disebabkan oleh tidak dimilikinya *collateral* (jaminan), prosedur yang rumit, dan kesiapan dana kas saat dibutuhkan. Namun karena kebiasaan tingkat suku bunga yang sangat rendah, maka untuk mengubah kebiasaan itu membutuhkan waktu yang lama.

OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI DESA

Perkembangan industrialisasi yang kian cepat, menuntut diterapkannya sistem dan pranata-pranata yang bersifat “modern”, yaitu sistem birokrasi modern perkotaan. Di lain pihak, masyarakat utamanya yang masih hidup di lingkungan perdesaan merasa “belum siap” karena masih tetap ingin mempertahankan tradisi dan budaya yang telah lama mereka

junjung tinggi. Fenomena seperti ini terungkap dalam sebuah jajak pendapat di desa Kenteng, Ambarawa.

Pada tahun 2000, tepatnya tanggal 19 juli, sebuah desa di pegunungan dekat lokasi wisata Bandung telah mencatat sejarah dan menjadi simbol dari penolakan masyarakat untuk mengganti sistem kelembagaan desa sebelumnya, digantikan dengan bentuk administrasi pemerintahan yang lebih “modern” berupa kelurahan. Pada hari itu dilakukan “jajak pendapat” yang diikuti oleh penduduk desa untuk memilih “Kelapa” bagi yang tetap menginginkan bentuk pemerintahan desa, dan “Sapu” bagi yang menginginkan kelurahan. Hasil jajak pendapat yang disaksikan pejabat pemda kabupaten dan DPRD dimenangkan oleh kelompok yang “pro-desa”, dengan selisih suara yang cukup besar.

Berbagai argumen mendasari kelompok-kelompok yang pro-desa dan yang pro-kelurahan. Alasan pertama berkaitan dengan masalah kepemimpinan dan demokrasi. Kepala desa dalam sistem lama merupakan hasil dari pilihan rakyat, dan karena itu dapat menjadi tumpuan dari aspirasi masyarakat. Karena ia “anak desa” dan bertempat tinggal di desa,

maka ia lebih menguasai persoalan yang dihadapi oleh desanya. Dengan demikian sudah menjadi tradisi bahwa kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, tetapi juga fungsi sosial, politik dan kultural. Sebaliknya, Lurah adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus birokrasi pemerintahan. Karena tidak dipilih oleh rakyat, pertanggungjawabannya lebih ditujukan kepada atasan. Adanya jam kerja tertentu, membuat pelayanan hanya dapat dilakukan pada saat jam kerja.

Di samping itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa peningkatan status desa menjadi kelurahan selalu akan diikuti oleh peningkatan pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Berbagai aset desa, seperti tanah kas desa akan “diambil alih” pengelolaannya oleh pemerintah kabupaten, sehingga selain pengembalian dana ke desa yang dirasa lebih “sedikit”, orang desa juga tidak dapat lagi mengontrol aset-aset desanya.

Kini (tahun 2002), status desa di kecamatan Ambarawa hanya tinggal 7 buah, sedang 9 lainnya sudah menjadi kelurahan. Pada tahun-tahun terakhir proses ke arah peningkatan status desa menjadi kelurahan akan semakin cepat. Ada beberapa desa yang saat ini dipersiapkan menjadi kelurahan. Desa-desa yang sekarang masih berstatus desa adalah Bejalen, Pasekan, Mlilir, Duren, Jetis, Kenteng, dan Candi. Sedangkan kelurahan-kelurahannya adalah: Ngampin, Pojok Sari, Tambak Boyo, Kupang, Lodoyong, Kranggan, Panjang, dan Bandungan. Pemerintah Daerah kabupaten Semarang juga berencana untuk “memekarkan” kecamatan Ambarawa menjadi dua yakni kecamatan Ambarawa dan Bandungan.

Dalam wawancara singkat di kecamatan terungkap pula upaya peningkatan status desa maupun pemekaran wilayah terkait dengan diterapkannya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pada era otonomi daerah, banyak sekali pegawai baik pusat maupun propinsi yang bukan lagi menjadi tanggungan

pemerintah pusat tetapi menjadi tanggung-jawab pemerintah kabupaten yang harus “diberi” pekerjaan dan gaji.

Birokrasi yang “gemuk” pada era otonomi daerah ini memang membutuhkan penyaluran atau penempatan para pegawainya. Lembaga pemerintahan desa yang telah “dinaikkan” statusnya menjadi kelurahan, dengan demikian, menjadi salah satu alternatif untuk menampung para pegawai eselon 4A, 4B, maupun 4C, yang banyak “didaerahkan” oleh kebijakan otonomi daerah. Dari sudut-pandang pemerintah daerah, yang masih menjadi “hambatan” bagi diterapkannya status kelurahan adalah masih adanya personil-personil perangkat desa “lama” yang masa jabatannya masih belum berakhir. Dalam kasus Pojoksari dan Tambakboyoy, syarat-syarat untuk menjadi kelurahan tidak terpenuhi karena tanah-tanah kas di desa tersebut bukan “milik” desa, tetapi tanah “Kodam”.

RAWA PENING SUMBER MASALAH ATAU SOLUSI MASALAH

Diskusi tentang Ambarawa belum lengkap bila belum menyinggung Rawapening, yang merupakan muara dari 10 sungai besar dan kecil. Akhir-akhir ini perbincangan tentang masa depan Rawapening (RP) cukup ramai, baik di kalangan pemerintahan daerah maupun di media masa. Pembicaraan itu seolah hendak mempromosikan daerah (baca: komoditi) ini agar dapat “dijual” kepada pihak luar khususnya kaum investor, baik investor Jakarta maupun investor asing. Diakui bahwa untuk mengembangkan industri pariwisata dengan cara-cara lama itu membutuhkan biaya tinggi. Dipertanyakan apakah pola “melihat keluar” (*outward looking*) masih perlu dipertahankan pada era otonomi ini.

Di wilayah Ambarawa banyak terdapat lokasi-lokasi menarik yang dapat dijual kepada investor seperti lokasi wisata alam Rawapening, wisata sejarah Musium Kereta Api lengkap dengan stasiun dan depo KA, candi gedong songo, maupun lokasi wisata perkebunan di Losari (*Losari Coffee*

Plantation). Disamping itu, Ambarawa juga memiliki benteng Willem, Gua Maria, Palagan. Di kawasan Tuntang-Lohpait terdapat agrowisata, Gua Maria Mayestica Tuntang, dan sejumlah situs di sekitar Tuntang.

Khusus Rawapening, diadakan kegiatan seminar nasional bertema “*Optimalisasi Pengembangan Rawapening dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah*” oleh UNDIP dan Pemda Jateng. Berbagai permasalahan akan dibahas pada seminar tersebut khususnya dalam pengelolaan Rawapening. Pengelolaan Rawapening selama ini melibatkan banyak pihak, lintas sektor, multi-dimensi, dan bahkan lintas wilayah. Rawapening ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Sentra Produksi (KSP) dengan “*leading sector*” Dinas Perikanan, namun kewenangan operasi dan pemeliharaan berada di sektor pengairan. Selain dimanfaatkan untuk sumber air baku bagi PLTA Jelok (21MW) dan PLTA Timo (12MW), Rawapening juga dibutuhkan petani di kabupaten Grobogan, Demak, dan Semarang untuk mengairi sawah.³ Di samping itu, Rawa Pening juga merupakan sumber air bersih bagi masyarakat Salatiga, menjadi tumpuan hidup bagi petani/nelayan air tawar, agroindustri pengolahan enceng gondok, dan agrowisata alam.

Di lain pihak, berbagai dampak negatif akibat pengelolaan kawasan Rawa Pening secara parsial antara lain adalah: a) penutupan enceng gondok sangat intensif (800 ha/30%), b) pendangkalan/sedimentasi tinggi (778.932 ton/ha/th atau 2,63 mm/th), c) tingkat erosi tinggi (296 ton/ha/th), d) lahan kritis mencapai > 26% (> 5.500 ha), e) pencemaran limbah/sampah pemukiman makin intensif, f) pendapatan petani rendah, serta g) institusi (pengelola) yang tidak profesional.⁴

Ketidakterpaduan instansi-instansi dalam menjaga kelestarian Rawa Pening, antara lain terlihat dari pembangunan Tempat Pelelangan

Ikan oleh Dinas Perikanan di pinggir Rawa Pening. TPI tersebut tidak dimanfaatkan untuk tempat berjualan ikan bagi para nelayannya, tetapi justru dipakai sebagai tempat menjemur enceng gondok serta parkir sepeda motor para pemancing di rawa itu. Dilaporkan juga bahwa dinas pengairan pernah membeli peralatan berat untuk memotong perkembangan enceng gondok yang makin merajalela, namun peralatan mahal tersebut seolah dibiarkan menjadi “besi tua”. Di samping itu, masyarakat di sekitar rawa memanfaatkan enceng gondok untuk dijadikan bahan baku industri kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditi ekspor. Enceng gondok dengan demikian mampu menambah pendapatan penduduk.

DESA-DESA KASUS

1. Desa Bejalen

Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Darto Susiadi ini memiliki luas wilayah 4,70 km² dan berpenduduk 1555 jiwa (429 KK), dibagi menjadi dua dusun yakni Bejalen Timur dan Bejalen Barat. Batas-batas desa adalah di sebelah utara Kelurahan Lodoyong, Kupang, dan Tambak Boyo, sebelah selatan desa Banyubiru, Kelurahan Pojoksari di sebelah barat, dan Kecamatan Tuntang di sebelah Timur. Ketinggian wilayahnya 465 dpl dan merupakan bentuk dataran dengan curah hujan 2000-3000 ml per tahun, serta suhu antara 22-33°C. Jarak dengan kecamatan Ambarawa adalah 2 km, dan 20 km dari kabupaten Semarang.

Mata pencaharian utama penduduk adalah tani dan nelayan. Meskipun letaknya paling dekat dengan rawa Pening di antara desa-desa lain di Ambarawa, namun manfaat kedekatannya itu belum dapat dirasakan oleh penduduk di desa Bejalen. Meskipun dekat dengan rawa Pening, pertanian sawah di Bejalen hanya mengandalkan air di musim hujan, sehingga panen padi hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Tanah pertanian dengan irigasi sederhana mencakup tanah pertanian seluas 15

³ Publikasi Seminar 6 Juni 2002, UNDIP-Pemda Jateng.

⁴ Ibid.

ha, sedangkan sawah tadah hujan mencakup luas 66,7 ha. Penduduk khususnya petani juga belum mampu memanfaatkan dua sungai kecil yang melewati desanya menuju Rawa Pening. Setiap tahun, penduduk berbondong-bondong membuat dam/bendungan untuk mengairi sawah.

Meskipun kelompok swadaya masyarakat di desa ini yang bergerak dalam bidang keuangan mikro cukup banyak, namun belum secara maksimal dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain permodalannya masih sangat kecil, lingkup kegiatannyapun masih terbatas. Di tingkat desa terdapat PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang salah satu kegiatannya adalah kelompok belajar usaha. Ada beberapa kelompok usaha yang terbentuk dari KBU di Bejalen, yaitu: 1. Kelompok Mina Maju, beranggotakan 11 orang bapak-bapak, mengusahakan ternak ikan lele; 2. KBU Mino Antigo, beranggotakan 14 ibu-ibu, mengusahakan pembuatan telur asin; 3. KBU Prestasami (Presto, Tahu, Salon, dan Mie), beranggotakan 18 ibu-ibu. 4. KUB Maju Lestari, beranggotakan 15 orang berusaha di bidang perikanan, jaring, branjang, dll.

Menurut Kaur Pembangunan, Ibu Ani, PKBM merupakan kegiatan yang dulu merupakan kerjasama program dari Depdikbud, dinas perikanan, dan dinas peternakan. Pada saat ini kegiatannya masih sangat terbatas, dengan permodalan yang sangat kecil. Meskipun demikian, pemerintah desa cukup tanggap terhadap keadaan ini, dan tetap memikirkan bagaimana mengembangkan kelompok-kelompok tersebut.

Sebagai sebuah desa bukan IDT, pada tahun 1997 desa ini mendapatkan dana bantuan dari pemerintah propinsi/kabupaten bernama Bantuan Non-IDT, dan dibentuklah kelompok Lestari Mulyo yang sampai saat ini masih diketuai oleh Bpk F.X Widodo. Pada awal diterapkannya program itu (tahun 1997), kelompok Lestari Mulyo hanya beranggotakan 10 KK dengan bantuan dana sebesar Rp 1,1

juta. Menurut Kades, kini dana tersebut sudah berkembang menjadi Rp 1,5 juta. Kelompok ini masih aktif hingga kini dan selalu melakukan pertemuan setiap tanggal 14 bersama-sama pertemuan kelompok UEDSP yang ada di desa tersebut. Sedangkan UEDSP memiliki modal sebesar tujuh juta lebih, yang merupakan akumulasi dana dari 3 kali anggaran bantuan dari DPD. Modal ini disimpanpinjamkan dengan bunga yang sangat kecil, sehingga perkembangan modal kelompok menjadi relatif lambat.

Pada tahun 1999, di Bejalen juga terbentuk koperasi bernama Ngudi Luhur, beranggotakan 48 anggota dan diketuai oleh Sukanto. Selain menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam, koperasi ini juga merupakan "wadah" bagi penyaluran KUT (Kredit Usaha Tani). Sebagaimana terjadi di mana-mana, KUT di Bejalen juga banyak kredit yang macet, yakni sebanyak 40%. "Alasan" banyaknya kredit macet adalah kegagalan panen yang diakibatkan oleh serangan hama penyakit, terutama hama tikus.

2. Kelurahan Lodoyong

Berbeda dengan desa Bejalen, Lodoyong merupakan sebuah kelurahan yang ada di wilayah *urban*, yang terletak di seputar kota Ambarawa. Batas-batas wilayah Lodoyong adalah di sebelah Utara kelurahan Kupang, Selatan Desa Pojok Sari dan Bejalen, sebelah Barat kelurahan Panjang, dan sebelah Timur desa Bejalen. Kelurahan ini terbagi atas 6 lingkungan (eks dusun), yakni Pandean, Sanggrahan, Warung Lanang, Losari, Lodoyong, dan Bugisan.

Penduduk Lodoyong saat ini berjumlah 6.443 jiwa dan menempatkan kelurahan itu sebagai wilayah paling padat ketiga setelah kelurahan Kupang dan Panjang di kecamatan Ambarawa. Sebagai wilayah urban, penduduk Lodoyong sebagian besar sudah tidak lagi mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Industri, perdagangan dan jasa merupakan sektor-sektor yang menonjol

perannya dalam perekonomian masyarakat Lodoyong. Tidak heran bila di wilayah itu terdapat “kawasan sentra produksi”, yang merupakan pusat-pusat industri rakyat seperti kerajinan terbang, pembuatan tempe dan tahu, pembuatan roti dan makanan kecil, pertokoan, perusahaan jamu, pande besi, dan lain-lain. Di samping itu sektor perdagangan seperti pertokoan, rumah makan, dan hotel/penginapan juga banyak berkembang di kawasan itu.

Letaknya yang dekat dengan pusat keramaian seperti pasar Projo di kelurahan tetangganya, membuat kegiatan ekonomi masyarakat meningkat. Selain BRI unit Ambarawa yang mengambil lokasi kantornya di kelurahan Lodoyong, banyak pula lembaga perbankan lain seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang melayani jasa keuangan tidak saja untuk penduduk Lodoyong, tetapi juga untuk penduduk lainnya di kecamatan Ambarawa.

Meskipun tidak sebanyak desa Bejalen, kelompok-kelompok usaha mikro juga terdapat di Lodoyong. Koperasi Tani adalah sebuah lembaga yang dirintis oleh LKMD. Ibu-ibu PKK di kelurahan ini juga telah mengembangkan KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang salah seorang anggotanya, Bu Kasmi, memiliki sebuah warung makan di depan kantor kelurahan.

3. Desa Kebon Dalem dan Kuarasan

Satu-satunya desa IDT dari 11 desa/kelurahan di kecamatan Jambu adalah desa Kebon Dalem⁵. Lokasi desa ini terletak kurang lebih 4 km dari pusat kecamatan Jambu kearah pegunungan di sebelah barat. Pada tahun 1995, Prof. Mubyarto bersama

rombongan pernah berkunjung ke desa tersebut. Pada saat kunjungan penulis bersama tim Bina Swadaya (17 Mei 2002) menanyakan kepada kepala desa, Bp. Zainudin, apakah ia masih ingat kunjungan Prof. Mubyarto tersebut. Ia menjawab tidak ingat lagi karena ia baru menjabat kades belum genap dua tahun, dan menambahkan mungkin bapak mertuanya masih ingat karena sedang menjabat pada tahun-tahun itu. Sebagaimana dilaporkan Kasi PMD Jambu, Ibu Waziroh, laporan terakhir dari pokmas IDT telah berakhir sejak September 1997. Alasan yang dikemukakan adalah karena terjadinya krisis moneter sehingga kegiatan simpan pinjam di dalam pokmas menjadi macet.

Meskipun demikian, perkembangan dana IDT sampai dengan September 2002 dilaporkan telah mencapai Rp 100,6 juta dari dana Rp 60 juta yang diberikan tiga kali selama tiga tahun, atau meningkat sebesar 68%. Pokmas IDT di Kebon Dalem saat terakhir dilaporkan berjumlah 13 kelompok. Pada tahun pertama, dana Rp 20 juta dibagi kepada 6 pokmas yaitu *Kepodang, Merpati, Glatik, Perkutut, Kutilang*, dan *Murai*, untuk sebagian besar dibelikan kambing. Pada tahun kedua dana IDT diberikan kepada 7 pokmas yaitu *Pepaya, Klengkeng, Mangga, Ace, Apel, Jambu*, dan *Pisang*, yang seluruhnya dibelikan kambing. Sedangkan tahun ketiga dana IDT hanya diberikan kepada satu pokmas yakni Margo Mulyo, beranggotakan 25 orang, untuk dibelikan sapi.

Menurut Bp. Dawan, pendamping IDT desa itu, ia pernah berusaha mengaktifkan kembali 13 pokmas yang ada. Pak Dawam pernah mengundang para ketua pokmas dan anggotanya, namun tidak lebih dari 3 orang saja yang datang. Salah satu alasan mereka tidak mau datang atau mengaktifkan kegiatan pokmas, menurut guru SD itu, adalah karena para anggota “takut” uangnya akan diambil kembali oleh pemerintah. Praktis Pak Dawam saat ini merasa sudah “putus asa”. Namun mengetahui penulis bersama-sama tim Bina

⁵ Di kabupaten Semarang, desa IDT berjumlah 45 buah dari 235 desa/kelurahan. Desa IDT tersebut tersebar di 15 kecamatan, yaitu Getasan 4 desa, Tenganan 1 desa, Susukan 2 desa, Suruh 3 desa, Pabelan 5 desa, Tuntang 1 desa, Bringin 1 desa, Pringapus 3 desa, Ungaran 3 desa, Bancak 5 desa, sedangkan Bergas dan Ambarawa adalah dua kecamatan yang tidak memiliki desa IDT.

Swadaya berencana untuk menghidupkan kembali kelompok masyarakat yang ada di Ambarawa dan sekitarnya melalui *pendampingan mandiri*, pak Dawam menyambut positif dan bersedia membantu mengaktifkan kembali pokmas di desanya.

Selain pokmas IDT yang saat ini sudah “*mandeg*”, kelompok sosial-ekonomi yang masih berjalan sampai sekarang adalah kelompok tani dusun. Di Kebon Dalem terdapat 12 dusun yaitu Ganjuran, Banyunganti, Kalibening, Krajan, Jenganti, Dilem, Ngasinan, Jandon, Gumuk, Seroto, kalices, dan Kebonsari. Kelompok tani dusun yang cukup aktif menyelenggarakan pertemuan setiap bulan adalah kelompok tani di dusun Ganjuran, Banyunganti, Kalibening, Krajan, dan Jenganti. Kelompok-kelompok ini mengadakan pertemuan rutin setiap bulan.

Di Kebon Dalem terdapat juga “Jum’at Bersih”, yaitu kegiatan pada hari Jum’at sore untuk membersihkan halaman rumah keluarga masing-masing terutama di dusun Jenganti dan Krajan. Selain membersihkan halaman, kegiatan ini juga diikuti dengan mengumpulkan jimpitan dan tabungan masyarakat. Hasil yang telah dicapai pada tahun lalu adalah terkumpulnya dana yang dipergunakan masyarakat untuk melakukan ziarah-wisata ke 9 wali songo.

Di kalangan ibu-ibu dusun Banyunganti juga terdapat kelompok tani Mawar yang diketuai oleh Ibu Marsiyah. Kegiatan kelompok beranggotakan 12 orang ini adalah pembuatan criping ketela. Meskipun saat ini produksinya masih sangat terbatas, produk criping Banyunganti ini pernah mendapatkan pasaran yang luas dan “dikenal” di Ambarawa dan sekitarnya.

4. Kenteng

Desa Kenteng menjadi terkenal karena menjadi satu-satunya desa di Jateng maupun di Indonesia yang pernah melaksanakan “jajak pendapat”. Hasil jajak pendapat yang dimenangkan oleh mereka yang “pro-desa”

membuat desa ini dikenal sebagai desa yang masyarakatnya cukup kritis terhadap berbagai persoalan yang mempengaruhi desanya. Kemenangan ini bisa dijadikan simbol bagi upaya untuk tetap mempertahankan tradisi sosial budaya masyarakat.

Selain dikenal karena jajak pendapatnya, Kenteng juga dikenal sebagai desa yang relatif makmur. Dengan luas wilayah 3,57km² dan jumlah penduduk 4.278 jiwa, desa ini tergolong cukup padat yaitu 1.198 jiwa/km². Relatif majunya perekonomian membuat desa ini sering dijadikan desa percontohan dan tujuan kegiatan studi banding desa-desa lain. Pernah juga desa ini menjadi tujuan studi banding dari Filipina tentang keberhasilan keluarga berencana (KB).

Komoditi pertanian yang dihasilkan petani Kenteng adalah sayur-sayuran seperti kol, sawi, buncis, dan lain-lain. Selain itu petani Kenteng juga menghasilkan aneka bunga, seperti bunga krisan, gladiol, mawar, dan lain-lain, yang dikirim ke kota-kota besar seperti Semarang dan Jakarta. Pemasaran bunga dilakukan seminggu dua kali, yakni hari Selasa dan Jum’at. Pasar yang sangat ramai berada di desa tetangganya kurang lebih 3 km, yang hanya memanfaatkan pinggir jalan sebagai tempat dagangannya. Panen bunga dilakukan sore hari dan dijual menjelang pagi antara pukul 2 – 5.

Di desa Kenteng terdapat banyak kelompok tani yang relatif maju baik dari aktivitasnya maupun dari sisi kelembagaan. Menurut Bpk Pj Kades, dari 7 dusun terdapat 9 kelompok tani dan 4 diantaranya cukup aktif. Kelompok-kelompok tani itu adalah *Sidodadi* di dusun Karanglo, *Ngudi Raharjo* I di dusun Ampal Gading, *Ngudi Mulyo* dan *Sido Maju* di dusun Gelaran. Di tingkat desa, terdapat lembaga Koperasi bernama *Tunas Karya*, kelompok tani ibu-ibu *Wisma Sejahtera* dibawah bimbingan Ibu dokter Damayanti, dan kelompok tani wiraswasta yang bergerak dalam pembuatan tahu serasi. Kelebihan yang dimiliki kelompok-kelompok tani di desa

Kenteng selain aspek kelembagaan dan aktifnya kegiatan anggota adalah dalam penetapan besaran bunga dalam kegiatan simpan pinjam. Terdapat beberapa kelompok yang telah menerapkan kebijakan bunga sesuai dengan tingkat bunga pasar 2,5 – 3 persen perbulan.

5. Jetis

Menurut kades Jetis, Bp. Sutanto, pertanian masih tetap menjadi penggerak utama ekonomi rakyat di desanya. Selain padi, bunga (Krisan, gladiol, dll), dan buah-buahan seperti salak pondoh dan klengkeng, sayur mayur juga banyak diusahakan oleh penduduk. Karena tingkat budidaya yang intensif, maka hasilnya cukup besar. Desa seluas 2,78 km² dengan penduduk 3270 jiwa ini merupakan desa yang relatif makmur. Bahkan sekalipun banyak penduduk yang statusnya buruh tani, namun banyak di antara mereka yang jauh lebih makmur ketimbang petani pemilik tanah. Mereka pada umumnya mampu menyewa tanah (saat ini per hektar Rp 3 juta/tahun) dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penduduk miskin di desa ini tak lebih dari 30 KK (3,7%).

Desa yang terletak 2 km di bawah lokasi wisata Bandungan ini memiliki 2 kelompok tani Bunga Potong yang telah berjalan lama. Kegiatan utama kelompok ini adalah dalam pemasaran bunga. Pada setiap Senin dan Kamis sore petani mulai memetik bunga kemudian beberapa tangkai dikumpulkan dalam ikatan-ikatan menurut kategori dan klasifikasinya. Bunga tersebut kemudian dikumpulkan pada kelompok yang bertanggungjawab untuk memasarkannya kepada pembeli dari kota, pada setiap hari Selasa dan Jum'at antara pukul 2 – 5 pagi. Uang yang terkumpul dari hasil penjualan ditampung di kelompok dan baru akan diambil oleh pemiliknya pada akhir/awal bulan. Kelompok akan mendapatkan pemasukan dari potongan Rp 500 setiap ikat bunga yang telah terjual. Selama ini uang yang terkumpul dalam

kelompok telah dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat seperti membeli “tenda manten”, kursi, dan lain-lain.

Pada tahun ini upaya pemerintah desa bersama pemda kab. Semarang dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat desa Jetis dan sekitarnya, telah dimulai dengan pembuatan pasar bunga dan pasar buah berlokasi di dekat balai desa. Pasar bernilai Rp 1,2 milyar akan beroperasi tahun depan dan pemerintah desa akan mendapat hasil pengelolaan pasar tersebut 6 banding 4 dengan pemerintah kabupaten.

6. Ngampin

Julukan sebagai salah satu lumbung beras di kawasan Ambarawa tampaknya kini sudah tidak lagi terdengar seperti pada era delapan puluhan, ketika bersama-sama dengan desa-desa sekitar di kecamatan Jambu dan Banyubiru, Ngampin mampu menyumbang cukup besar pada permintaan beras penduduk Ambarawa maupun untuk dikirim keluar daerah itu. Sejak akhir tahun 80-an hingga pertengahan tahun 90-an, predikat “lumbung padi” mengalami gangguan oleh serangan hama tikus yang memporakporandakan tanaman padi sehingga petani sawah di daerah itu mengalami gagal panen. Bahkan lembaga “tradisional” lumbung padi di Ngampin pada saat itu mengalami kehabisan stok padi. Meskipun kini masih ada namun “simpanan”-nya bukan dalam bentuk padi tetapi dalam bentuk uang.

Sejak lima tahun terakhir kondisi pertanian sawah berangsur-angsur mengalami perbaikan antara lain setelah pemerintah maupun masyarakat menyatakan “perang” terhadap tikus. Dilaporkan bahwa produktifitas sawah sudah mengalami kenaikan yang cukup baik untuk padi mencapai 5,5 ton/hektar pada tahun 2000 dan 6,1 ton/hektar pada tahun 2001. Melalui dua kali masa tanam, yakni seluas 42,5 ha pada musim kemarau, dan 72,5 ha pada musim hujan, panghasilan petani dan buruh tani sudah kembali meningkat.

Meskipun pengendalian hama tikus cukup berhasil di Ngampin, namun potensi ancaman untuk tetap berkembangnya hama tersebut tetap besar. Penyebabnya adalah lokasi sawah yang berdekatan dengan rawa-rawa yang merupakan tempat yang sangat bagus bagi sarang hama tikus. Dari 109 ha lahan sawah, 30 ha di antaranya adalah sawah rawa. Sawah-rawa ini beberapa di antaranya tetap dapat ditanami padi, tetapi hanya berlangsung satu kali tanam pada musim kemarau. Pernah ada upaya untuk mengatasi tanah berawa ini dengan menggali kembali kali yang membelah desa ini menuju Rawapening. Namun begitu alat berat “bego” telah menggali sungai sampai batas desa Ngampin, proyek normalisasi saluran air ini tidak diteruskan lagi sampai ke Rawapening yang masih melewati satu desa lagi yakni Pojoksari. Hingga kini rawa yang berpotensi menjadi “markas serangan” hama tikus tetap menjadi ancaman bagi para petani di Ngampin dan sekitarnya.

Untuk terus berjaga-jaga terhadap ancaman ini maka diadakan “gerakan” penanggulangan hama tikus melalui program yang tetap setiap tahunnya, yakni antara lain Gobyak Tikus Massal, lomba Gobyak Tikus, dan lain-lain. Akan tetapi menurut ketua kelompok tani di Ngampin, Bp. Sarmadi, gerakan ini kurang mendapat tanggapan positif dari petani di tetangga desanya, sehingga gobyak tikus tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ia mengusulkan kepada penulis, untuk ikut mempromosikan terbentuknya “forum” bagi kelompok-kelompok tani di Ngampin khususnya dan Ambarawa umumnya, untuk mewadahi program bersama antara lain dalam program pemberantasan hama tikus.

Beberapa kelompok tani terdapat di kelurahan Ngampin yang terbagi ke dalam 6 lingkungan (eks.dusun), dan yang paling aktif adalah di lingkungan Krajan. Kelompok tani “Sri Makmur” di lingk. ini pernah menjadi juara kelompok tani di tingkat kabupaten. Kelompok-kelompok lain yang cukup aktif di kelurahan Ngampin adalah di lingk.

Nglonjong, Ngampin Kulon, dan Glagah Ombo.

Kelompok tani Sri Makmur memiliki banyak bidang kegiatan, yang salah satunya adalah keuangan mikro berupa koperasi simpan pinjam, yang saat ini dipimpin oleh Bp. FX. Sutarmin. Koperasi yang didirikan pada tahun 1998, dan setelah didorong-dorong maka terbentuklah badan hukum koperasi pada tahun 1999, beranggotakan 90 orang. Kelompok ini merupakan inisiatif masyarakat murni dengan modal swadaya, dengan simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar masing-masing Rp 2.000 dan Rp 200, pada saat berdirinya. Melalui administrasi yang cukup rinci dan terbuka, koperasi ini mampu memenuhi kebutuhan anggota akan kredit sehari-hari.

Bunga yang ditetapkan bersaing dengan bunga pasar sebesar 3%/bulan dan maksimal pengembalian kredit selama 5 bulan. Apabila dalam lima bulan belum terlunasi maka bunga dinaikkan menjadi 5%/bulan pada bulan berikutnya.

KESIMPULAN/PENUTUP

Bila pembangunan selama Orde Baru cenderung menciptakan kesenjangan antar kota-desa, antar penduduk kaya dan miskin, antara sektor modern dan tradisional, dan bahkan antarwilayah, maka pola pembangunan pada era reformasi harus ditekankan pada pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*) atau pertumbuhan melalui pemerataan (*growth via equity*). Krisis moneter dan krisis multidimensi yang diikuti gerakan reformasi oleh mahasiswa, dalam batas-batas tertentu telah dapat “mengurangi” kesenjangan kota-desa atau modern-tradisional di kabupaten Semarang. Hal ini karena sektor ekonomi di perdesaan (atau sektor ekonomi rakyat) lebih tahan terhadap dampak krisis ketimbang sektor ekonomi modern. Setidak-tidaknya, gejala ini ditunjukkan oleh data statistik pendapatan perkapita kabupaten Semarang pada periode sebelum dan setelah krisis ekonomi (tabel 5).

Pendapatan perkapita per kecamatan di kabupaten Semarang pada tahun 1996 menunjukkan ketimpangan yang menonjol antara kecamatan-kecamatan yang basis perekonomiannya ditopang oleh sektor modern dibanding kecamatan-kecamatan yang berbasis pertanian. Pringapus, Bergas, dan Ungaran, adalah kecamatan-kecamatan berpendapatan tinggi dengan sektor modern sebagai penopang ekonominya. Di ekstrim yang lain, Susukan, Suruh, dan Bringin, adalah kecamatan-kecamatan dengan pendapatan perkapita rendah yang berbasis ekonomi perdesaan. Krisis moneter yang berpuncak pada tahun 1998 telah menurunkan secara drastis pendapatan perkapita di Pringapus, Bergas, dan Ungaran mencapai rata-rata diatas 20%.

Pada tahun 1999 dan tahun 2000, pendapatan perkapita penduduk di daerah itu tetap tidak menunjukkan gejala naik, tetapi terus mengalami penurunan rata-rata sebesar masing-masing -1% dan -10%, sehingga total penurunan dihitung sejak tahun 1996 dibanding tahun 2000, rata-rata 29%.

Sebaliknya, di tiga kecamatan Susukan, Suruh, dan Bringin, penurunan pendapatan akibat krisis tidaklah besar, dan bahkan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Pendapatan perkapita penduduk di kecamatan-kecamatan ini pada tahun 2000 rata-rata sudah hampir menyamai dan bahkan melebihi pendapatan perkapita mereka pada tahun 1996.

Tabel 5: Pendapatan Perkapita Penduduk Per Kecamatan Kab. Semarang Tahun 1996 dan 2000 (Harga konstan 1993)

Kecamatan	1996	2000	Naik/Turun
1. Getasan	1.002.496	892.357	(10,99)
2. Tenganan	1.056.743	934.077	(11,61)
3. Susukan	901.016	912.021	1,22
4. Suruh	865.677	833.090	(3,76)
5. Pabelan	1.338.097	1.316.981	(1,58)
6. Tuntang	1.041.442	884.470	(15,07)
7. Banyubiru	902.656	883.639	(2,11)
8. Jambu	925.440	863.571	(6,69)
9. Sumowono	1.050.524	976.169	(7,08)
10. Ambarawa	1.106.904	1.025.256	(7,38)
11. Bawen	1.438.007	1.089.497	(24,24)
12. Bringin	801.491	773.671	(3,47)
13. Pringapus	2.360.811	1.719.377	(27,17)
14. Bergas	3.975.580	2.808.389	(29,36)
15. Ungaran	3.053.487	2.124.951	(30,41)
Kab. Semarang	1.490.573	1.257.019	(15,67)

Sumber : Dinas Statistik Kab. Semarang

Terungkap dalam studi ini, bahwa pembangunan di wilayah Ambarawa pada khususnya, dan Kabupaten Semarang pada umumnya, telah dapat mencapai tingkat pertumbuhan tinggi di wilayah ini. Dari tahun

ke tahun sejak terbentuknya pemerintahan Orde Baru, berbagai program telah dilaksanakan melalui pendekatan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tinggi. Meskipun demikian, hasil yang dicapai melalui

pertumbuhan tinggi secara sentralistik ini memiliki banyak kelemahan, antara lain menciptakan kesenjangan antara kota-desa, sektor-modern, maupun golongan penduduk kaya-miskin.

Program pemerataan sebenarnya sejak lama telah dilaksanakan melalui pendekatan-pendekatan wilayah maupun pendekatan partisipasi masyarakat (*bottom-up*). Meskipun demikian, hasil yang dicapai melalui program-program ini dirasakan masih jauh dari memadai.

Program pemerataan melalui proyek/program pengembangan lembaga keuangan mikro di Ambarawa banyak ragamnya, baik yang merupakan kelompok bentukan pemerintah, maupun kelompok yang berawal dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Studi peninjauan ini menemukan berbagai lembaga kemasyarakatan (kelompok swadaya masyarakat), khususnya yang bergerak di bidang ekonomi produktif. (Lihat matrik)

Budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat solidaritas dan kegotongroyongan tetap menjadi faktor pendukung yang amat penting. Manfaat secara “ekonomis” kadang-kadang lebih “dinomor-

dukan” ketimbang manfaat yang secara sosial dapat diperoleh dari kegiatan swadaya masyarakat. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi semua pihak, pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang berupaya membantu masyarakat dalam memberdayakan dirinya. Kiranya keliru menyimpulkan bahwa tanpa program-program pemerintah masyarakat desa tidak mampu berbuat apa-apa. Sebaliknya tingkat keswadayaan masyarakat desa termasuk tinggi untuk secara mandiri mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Dinas Statistik Kab. Semarang, 2001, *Semarang Dalam Angka*.
- BPS, Dinas Statistik Kab. Semarang, 2001, *PDRB Kabupaten Semarang*.
- Koperasi Kelompok Tani SRI MAKMUR, *Laporan Keuangan 2001*.
- Mubyarto, 2001, *Ekonomi Kerakyatan, Yayasan Agro Ekonomika*.
- UNSFIR/UNDP, 2000, *Human Development Index*.

Lampiran 1. Matrik Kelompok Swadaya Masyarakat di 5 desa

Desa/Kel.& KSM	Kegiatan	Kelemahan/Hambatan	Opportunity/Peluang
Desa. Bejalen			
1. Mina Maju	Budidaya ikan di lahan sendiri, bukan di RP, anggota 11 orang bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penduduk belum mendapatkan manfaat dari kedekatannya dengan Rawa pening (enceng gondok, ikan, air) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi rawa pening belum dikembangkan maksimal untuk penduduk sekitar ▪ Kelembagaan ekonomi sudah terbentuk tapi belum dikembangkan ▪ Pertemuan rutin (PKK: tgl 14 jam 4 sore, Lestari Mulyo tgl 14 jam 19) pengurus aktif, ▪ DPD y.a.d. akan terfokus untuk membangun jalan di Bejalen Timur, menghubungkan RP ke kota ▪ Peranan wanita sangat menonjol dalam berbagai bidang, termasuk dalam perangkat desa (3 orang menjadi Kaur)
2. Mino Antigo	Telur asin, anggota 14 ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjir setiap tahun ▪ Hama tikus 	
3. Prestasami	Presto, tahu, salon, mi, anggota 18 ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topografi tanah miring, musim tanam tidak sama 	
4. Maju Lestari	Nelayan, jaring, branjang, dll, anggota 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskontinuitas program dari pemerintah. 	
5. Lestari Mulyo	Bantuan Non-IDT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah banyak bantuan/proyek pemerintah & LSM berupa bantuan fisik ▪ Anggota pokmas terbiasa dengan bunga pinjaman di bawah bunga pasar 0,5% - 1,5%/bulan, bahkan ada yang tak pakai bunga 	
6. UEDSP	Simpan pinjam		
7. PKK	Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (modal 4,1 juta)		
8. Kop. Ngudi Luhur	Penyaluran KUT & simpan pinjam, ketua Sukamto,		
9. Kelompok Akseptor Sukarini I & II	Kukesra/takesra aktif sampai putaran 5		
Kelurahan Lodoyong			
1. PKK	Koperasi ibu-ibu, Anggota pedagang, warung		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan ekonomi sudah berkembang, ▪ Lokasi merupakan wilayah perkotaan
2. Dasawisma			
3. Koperasi Sejahtera			
4. UEDSP	Simpan pinjam,		
5. Kawasan Sentra Industri Rawa Pening	Kerajinan terbang, tempe-tahu (RWII), Roti, Brondong, Jamu, Pande besi, Kaligrafi, dan perdagangan.		
6. Kelompok Wanita Tani Bugisan	Cabe, timun		

Desa/Kel.& KSM	Kegiatan	Kelemahan/Hambatan	Opportunity/Peluang
Desa Kebon Dalem, kec. Jambu			
1. Pokmas IDT 13 buah	Ternak kambing, sapi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pokmas IDT Tidak aktif sejak "krisis", tidak ada inisiatif dari pemerintah maupun anggota untuk mengembangkan pokmas ▪ Kepala desa kurang aktif, masih baru, dan kurang memahami persoalan di desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana IDT 60 juta, mampu berkembang menjadi 100,6 juta per Sept 1997. ▪ Pendamping IDT (Bp. Dawam) masih memiliki keinginan untuk dapat mengembangkan pokmas IDT
2. Kel. Yasinan			
3. Kel Tani per dusun (12 dusun: Ganjuran, Banyunganti, Kalibening, Krajan, Jenganti, Dilem, Ngasinan, Jandon, Gumuk, Seroto, Kalices, Kebonsari.			
4. Jum'at Bersih			
5. Kel Pembuat Criping 12 orang	Pembuatan & pemasaran criping,		
6. Kel. Tani Mawar			
Desa Kwarasan			
1. KU Kadas	25 anggota, Kredit Konservasi Daerah Aliran Sungai (Dusun Ro)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat belum menanam tanaman yang bernilai ekonomis tinggi 	
2. Kel. Tani Sidorukun (Aktif)	Arisan, simpan-pinjam		
3. 12 Kelompok PLKB			
4. UEDSP			
Desa Kenteng			
1. Koperasi Tunas Karya (desa)	Simpan-pinjam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masalah hama/penyakit tanaman sayuran "Mbendol" menyerang Kol & Sawi ▪ Fenomena "pasar gila", harga cabe di Bandung hanya Rp 9.000, di Semarang Rp 25.000 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kedekatan dengan obyek wisata ▪ Akses sarana/prasarana mudah dijangkau ▪ Kelembagaan sosial ekonomi sudah terbentuk dalam masyarakat ▪ SDM sudah cukup maju ▪ Sudah ada kelompok yang mematok bunga 2,5% - 3%/bulan
2. Kel. Tani Ibu-ibu Wisma Sejahtera (Bu Dokter Damayanti)	Simpan-pinjam, pemasaran,		
3. Kel. Tani Wiraswasta Pabrik Tahu Serasi (Paguyuban Damai – Bp. Siswoyo & Ibu Khotijah)	Simpan-pinjam, pemasaran, kios		
4. UB			
5. Kel. "Seloso Pon"			
6. Kel. Ojek (3 tempat)	Jasa		
7. Kel Tani 7 dusun, yang aktif 4 dusun yi: Kel Sidodadi, Ngudi Raharjo, Ngudi Mulyo, Sido Maju	Arisan, simpan-pinjam,		

Desa/Kel.& KSM	Kegiatan	Kelemahan/Hambatan	Opportunity/Peluang
Desa Jetis			
1. Kel.Bunga Potong	Kerjasama pemasaran, dan persewaan tenda untuk para pedagang bunga		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pasar desa yang cukup besar, dan akan dibangun pasar bunga oleh pemda kab.
2. Kel. Bordir, (Dept. Perindustrian)	Pemasaran		
3. Kel. Buruh tani	Mengorganisir tenaga kerja untuk pengolahan tanah, dll		

Lampiran 2. IPM Jawa Tengah Tahun 1996 & 1999

Kabupaten/Kota	Indek Harapan Hidup				Indek Pendidikan				Indek Daya Beli				Indek Pembangunan Manusia			
	1996	Peringkat	1999	Peringkat	1996	Peringkat	1999	Peringkat	1996	Peringkat	1999	Peringkat	1996	Peringkat	1999	Peringkat
Salatiga	68,3	14	74,2	11	82,9	1	84,2	1	62,9	35	45,3	1	71,4	4	67,9	1
Surakarta	75,5	2	76,5	3	81,1	2	81,5	4	66,4	10	43,3	4	74,3	1	67,1	2
Magelang	69,7	11	73,5	14	80,1	3	82,2	2	67,0	5	44,9	2	72,3	3	66,9	3
Kota Semarang	74,8	3	75,3	7	78,3	4	81,7	3	65,6	21	42,1	7	72,9	2	66,4	4
Semarang	71,0	7	76,0	6	72,2	7	74,3	8	66,7	7	40,8	16	69,9	5	63,7	5
Temanggung	70,3	10	76,2	5	70,9	10	73,2	9	66,3	12	41,0	14	69,2	7	63,5	6
Sukoharjo	73,0	5	73,5	13	68,0	13	72,4	11	67,1	4	41,8	9	69,4	6	62,6	7
Demak	67,0	16	72,8	16	68,9	11	73,1	10	66,8	6	40,9	15	67,6	12	62,3	8
Banyumas	66,0	18	71,8	17	72,8	6	75,0	6	66,1	16	39,9	21	68,3	9	62,2	9
Tegal	63,5	30	69,3	30	71,6	8	72,3	12	65,3	25	43,7	3	66,8	19	61,8	10
Klaten	67,7	15	73,5	15	66,6	17	68,9	21	68,2	1	42,7	5	67,5	13	61,7	11
Purworejo	65,2	24	71,2	24	71,0	9	71,4	14	67,2	3	42,1	6	67,8	10	61,6	12
Pati	71,8	6	77,7	1	63,2	29	65,8	31	67,4	2	41,3	12	67,5	14	61,6	13
Kudus	66,3	17	71,3	22	68,6	12	74,4	7	66,5	9	39,1	25	67,1	17	61,6	14
Magelang	65,8	21	71,7	20	67,6	15	71,5	13	65,7	19	41,6	10	66,4	20	61,6	15
Jepara	68,5	13	74,3	10	67,0	16	68,7	22	66,3	14	40,7	17	67,3	15	61,2	16
Kebumen	64,5	29	70,3	29	65,8	22	71,2	15	65,0	27	42,1	8	65,1	26	61,2	17
Rembang	65,8	22	71,7	21	67,9	14	69,7	16	65,0	28	41,5	11	66,3	21	60,9	18
Pekalongan	66,0	20	71,8	19	73,7	5	75,6	5	63,8	34	34,2	33	67,8	11	60,5	19
Karanganyar	74,2	4	75,2	8	65,0	24	65,7	32	65,8	18	40,3	19	68,3	8	60,4	20
Grobogan	65,5	23	71,3	23	65,9	21	69,4	19	65,7	20	40,2	20	65,7	23	60,3	21
Batang	66,0	19	71,8	18	66,4	19	68,4	23	66,4	11	39,4	24	66,3	22	59,9	22
Boyolali	70,5	8	74,0	12	64,9	25	68,0	27	66,2	15	37,0	29	67,2	16	59,7	23
Wonosobo	65,2	25	71,2	25	66,6	18	69,6	18	65,4	23	38,3	26	65,7	24	59,7	24
Wonogiri	76,0	1	76,8	2	58,4	32	63,3	33	66,6	8	38,1	27	67,0	18	59,4	25
Cilacap	64,5	28	70,3	28	64,7	26	68,1	25	65,3	26	39,5	23	64,8	28	59,3	26
Kendal	62,2	32	66,2	33	62,6	30	68,2	24	64,7	30	41,3	13	63,1	33	58,6	27
Banjarnegara	64,8	27	70,7	27	63,6	28	69,7	17	64,8	29	35,2	32	64,4	29	58,5	28
Tegal	61,0	33	67,0	32	64,1	27	68,1	26	66,1	17	40,5	18	63,7	30	58,5	29
Blora	69,0	12	74,8	9	58,0	34	60,0	34	64,2	31	38,1	28	63,7	31	57,7	30
Sragen	70,5	9	76,3	4	56,3	35	59,5	35	64,2	32	36,6	30	63,7	32	57,5	31
Purbalingga	64,8	26	70,7	26	65,5	23	69,3	20	66,3	13	30,4	35	65,5	25	56,8	32
Pekalongan	63,3	31	69,2	31	66,1	20	67,9	28	65,5	22	33,2	34	65,0	27	56,8	33
Brebes	58,0	35	63,8	35	58,1	33	66,0	30	65,4	24	39,6	22	60,5	35	56,5	34
Pemalang	60,0	34	65,8	34	62,0	31	66,5	29	64,1	33	36,0	31	62,0	34	56,1	35
Total	66,3		72,2		66,5		69,9		68,1		40,3		67,0		60,8	